



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
NATIONAL COUNCIL PARLEMEN AFRIKA SELATAN  
BERSAMA KOMISI V DPR RI  
(BIDANG : INFRASTRUKTUR dan TRANSPORTASI)**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan ke-	: V (Lima)
Hari/Tanggal Pertemuan	: Senin, 10 Juli 2017
Jam Pertemuan	: 15.30 – 17.10 WIB
Tempat Pertemuan	: Ruang Tamu Pimpinan DPR RI Gedung Nusantara III Lantai II
Pimpinan Pertemuan	: Dr. Michael Watimena, SE.,MM/ Wakil Ketua Komisi V
Hadir Komisi X DPR RI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dr. Capt. Anton Sihombing - Fraksi Partai Golkar</li><li>2. Hamka B Kady – Fraksi Partai Golkar</li><li>3. Willem Wandik, S.Sos – Fraksi Partai Golkar</li><li>4. Hj. Fatmawati Rusdi, SE - Fraksi PKB.</li><li>5. Sahat Silaban, SH – Fraksi Nasdem</li></ol>
Hadir Delegasi Parlemen Afrika Selatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Honorable Committee Chairperson on Education and Recreation, African National Congress, Ms. L.L. Zwane</li><li>2. Honorable Committee Chairperson on Social Service, African National Congress, Ms. L.C. Dlamini</li><li>3. Honorable African National Congress Whip, Ms. T.K. Mampuru</li><li>4. Honorable African National Congress, Ms. P.C. Samka and Ms. L. Moshadi</li><li>5. Honorable, Mr. M. Khawula, Inkatha Freedom Party, African National Congress</li><li>6. Honorable, Mr. C. Hattingh and Ms. T. Mpambo-Sibhukwana, DA, African National Congress</li><li>7. Honorable, Ms. D.B. Ngwenya, EFF, African National Congress</li><li>8. Secretary of the Committee, Ms. N. Skaka and Ms. MA William</li><li>9. Committee Content Advisor, Mr. L. Komle and Ms. T.J. Ketyle</li></ol>
Hadir Mitra Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Artanto S.Wangadinata (Diplomat Madya, Kementerian Luar Negeri)</li><li>2. Irwan Iding (Kasubdit Kementerian Luar Negeri)</li></ol>

## I. Pendahuluan

Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Dr. Michael Watimena, SE.,MM (Wakil Ketua Komisi V) yang memperkenalkan seluruh anggota DPR RI dari Komisi V serta pendamping dari Kementerian Luar Negeri RI yang hadir dalam pertemuan tersebut.

## II. Kesimpulan

1. Komisi V DPR RI dan *National Council* Parlemen Afrika Selatan masing - masing menyampaikan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan. Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa:
  - a. Hingga tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia adalah 38.431 Ha yang tersebar di 4.108 kawasan dan menjadi target penanganan Kementerian PUPR sampai tahun 2019 nanti. Pada tahun 2016, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh seluas 2.162 Ha yang tersebar di berbagai Provinsi di Indonesia (Renstra Ditjen Karya 2015 – 2019) melalui gerakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
  - b. Program penanganan kawasan kumuh ini juga merupakan upaya mendukung tercapainya target Sustainable Development Goals (SDG) terutama (Goal 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.
  - c. Kami perlu sampaikan Progres Program KOTAKU yang menjadi program monumental di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR :
    - 1) Dalam hal penyediaan infrastruktur air minum, capaian sampai dengan awal tahun 2016 sebesar 71,05% dari target 100% pada tahun 2019. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai program antara lain pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional, pembangunan SPAM perkotaan, SPAM berbasis masyarakat, SPAM di kawasan khusus, SPAM Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terfasilitasi, dan SPAM Non – PDAM terfasilitasi.
    - 2) Untuk penyediaan infrastruktur sanitasi, capaian sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 62%, dan untuk mencapai target 100% pada tahun 2019 akan dilakukan program pengolahan air limbah skala regional, skala kota, dan skala kawasan, pengolahan air limbah khusus, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, dan pembangunan drainase lingkungan.
  - d. Tupoksi Komisi V DPR RI terkait dengan isu air dan sanitasi di permukiman informal dapat kami sampaikan sebagai berikut :
    - 1) Dari fungsi legislasi, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah telah menyusun Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Rancangan Undang - Undang tentang Sumber Daya Air yang sedang dibahas Komisi V DPR RI. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Pola penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas.

- 2) Dari fungsi penganggaran (Budgeting), Komisi V DPR RI melalui politik anggaran, mendukung program - program yang dicanangkan oleh Pemerintah, khususnya Ditjen Cipta karya Kementerian PUPR seperti program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang turut mendorong gerakan 100 – 0 – 100 (Kebutuhan Air Minum Terpenuhi 100%, Kumuh 0%, dan Sanitasi 100%) tahun 2019 yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015 – 2019. KOTAKU akan dilaksanakan di 34 Provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu seluas 38.431 Ha, terdiri dari 23.473 Ha berada di wilayah perkotaan dan 11.957 Ha di wilayah perdesaan.
- 3) Dari fungsi pengawasan (controlling), Komisi V DPR RI secara terus menerus mengawasi, menganalisis, dan mengevaluasi setiap program yang telah dijalankan baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dngar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum maupun melalui Kunjungan Kerja Reses, Kunjungan Spesifik, dan/atau Kunjungan Perorangan agar target Gerakan 100 – 0 – 100 tercapai tahun 2019 berdasarkan regulasi dan anggaran yang telah dialokasikan.

2. *National Council of Provinces* Afrika Selatan melalui Ketua Komite yang membidangi Pelayanan Sosial, MS. L.C. Dlamini menyampaikan beberapa poin sebagai berikut :

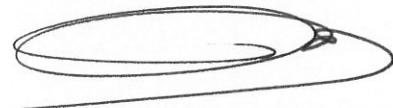
- a. Komite yang membidangi Pelayanan Sosial (Committee on Social Service) mempunyai tugas dalam pelayanan air dan Sanitasi.
- b. Tujuan pertemuan ini adalah mendengarkan paparan Komisi V DPR RI dan mempelajari praktek pelayanan air dan sanitasi di permukiman kumuh (informal) di Indonesia sebagai pembanding dalam membuat kebijakan dan regulasi terkait di Afrika Selatan.
- c. Afrika selatan merupakan salah satu negara yang kurang beruntung karena kekurangan air dan curah hujan yang rendah. Air yang didistribusikan ke warga sebagian besar merupakan hasil dari daur ulang melalui evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan, limpasan (runoff), dan infiltrasi. Ada fasilitas pengolahan air limbah di 9 Provinsi Afrika Selatan.
- d. Ada 80% warga di Afrika Selatan mendapat akses air bersih termasuk sampai ke desa - desa. Selebihnya masih belum mendapat akses air bersih.
- e. *National Council of Provinces* khususnya Komite yang membidangi Pelayanan Sosial bertugas untuk mengawasi pemerintah dan terus memperjuangkan akses rakyat terhadap air bersih.
- f. Setiap dinas di tiap pemerintahan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi warganya.
- g. Tiap warga berhak atas 6 kilo perliter perbulan, apabila dipakai lebih maka akan dikenakan tarif. Masalah yang dihadapi adalah banyak warga yang tidak mau bayar kelebihan pemakaian air.
- h. Ada kampanye secara besar – besaran untuk penghematan air di Afrika Selatan. Dan melakukan revitalisasi bendungan – bendungan air.
- i. Di Afrika Selatan ada Dewan Layanan Air yang bertugas mengawasi dan memantau berbagai kebijakan tentang air.
- j. Afrika Selatan sedang memulai desalinasi air laut di Provinsi tertentu.

- k. Sanitasi layak di Afrika sudah berjalan baik.
- l. Ada Kementerian Air dan Sanitasi di Afrika Selatan.
- m. National Council of Provinces dari Komite Air dan Sanitasi Afrika Selatan menyampaikan beberapa pertanyaan terlampir.

### III. Penutup

Pertemuan ditutup pada pukul 17.10 WIB

a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat



Drs. Robert Juheng Purba  
NIP. 19620703 199203 1 002

## Lampiran Pertanyaan

Pertanyaan dari *National Council Provinces* Afrika Selatan:

1. Program pelatihan apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat terkait air dan sanitasi?
2. Bagaimana proses pengadaan infrastruktur di Indonesia sehingga dapat terhindar dari praktek korupsi?
3. Kendala yang dihadapi oleh Afrika Selatan saat pembersihan atau pengosongan permukiman kumuh adalah permukiman yang telah dikosongkan itu diisi kembali oleh penduduk lain. Bagaimana prakteknya di Indonesia?
4. Bagi Afrika Selatan, air adalah kehidupan dan sanitasi adalah martabat. Bagaimana Indonesia menangani masalah kebocoran air yang cukup besar?
5. Dalam konteks sanitasi, bagaimana sistem pembuangannya?
6. Apakah Indonesia mengalami kelebihan atau kekurangan air?